

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Pemberian Perlindungan Saksi dalam Tindak Pidana *Money Laundering* di Indonesia dan Malaysia

*Money Laundering* adalah salah satu sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan, salah satunya adalah korupsi guna menghilangkan jejak. Selain itu, nominal tindak pidana *money laundering* ini biasanya dalam jumlah besar, yang artinya bahwa hasil kejahatan korupsi tersebut telah mempengaruhi keuangan nasional bahkan global dan menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Bahaya selanjutnya dari *money laundering* membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, kejahatan perbankan mudah untuk menggunakannya dan dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. *Money Laundering* dapat dilakukan dengan beberapa cara, dewasa ini *Money Laundering* dilakukan dengan menanamkan modal di *fintech* yang tidak terdaftar di OJK maupun menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia.

Pada setiap proses pemeriksaan perkara pidana *Money Laundering*, salah satu kunci untuk memperoleh kebenaran materiil adalah saksi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 184 dan 185 KUHAP. Pasal 185 ayat (2) menyatakan, “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Sedangkan pada Pasal 185 ayat (3) berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai alat bukti yang sah lainnya”. Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan dari satu orang saksi saja tanpa disertai alat bukti yang lain, belum cukup untuk dapat membuktikan apakah seseorang terdakwa bersalah atau tidak. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangatlah tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam pengadilan, yang terutama berkenaan dengan saksi. Dari kasus yang banyak terlihat, tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan oleh karena ketiadaan saksi untuk menopang tugas jaksa. Dengan demikian keberadaan saksi merupakan suatu elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Namun demikian ternyata peran saksi dalam proses peradilan pidana masih jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum.

Hingga pada akhirnya pada tahun 2000 PBB melakukan konvensi internasional guna menanggulangi kejahatan internasional yang salah satunya mengatur mengenai perlindungan saksi tindak pidana *money laundering* pada Pasal 24 yang berbunyi :

- (1) Setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang tepat sesuai kemampuannya dalam memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan balas dendam atau intimidasi bagi saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian tentang pelanggaran yang dilindungi

oleh Konvensi ini dan, jika sesuai, untuk kerabat dan orang lain mendekat kepada mereka.

- (2) Tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal ini antara lain, dengan tidak mengurangi hak-hak tergugat, termasuk hak sampai proses:
  - (a). Menetapkan prosedur untuk perlindungan fisik orang-orang tersebut, apabila diperlukan dan memungkinkan maka dapat merelokasi mereka dan mengizinkan, jika sesuai, kerahasiaan atau pembatasan atas pengungkapan informasi tentang identitas dan keberadaan orang tersebut;
  - (b). Memberikan aturan dalam pembuktian untuk mengizinkan keterangan saksi diberikan dengan cara yang menjamin keamanan saksi, seperti memberikan keterangan melalui penggunaan teknologi komunikasi seperti tautan video atau sarana memadai lainnya.
- (3) Negara-negara pihak harus mempertimbangkan untuk membuat perjanjian atau pengaturan dengan negara lain untuk merelokasi orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
- (4) Ketentuan pasal ini juga berlaku bagi korban sepanjang mereka menjadi saksi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas jelaslah bahwa masalah perlindungan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana mengenai kasus pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu kunci agar pengungkapan kasus dapat berjalan sebaik-baiknya. Anggapan yang salah mengenai saksi sudah selayaknya diakhiri, dan guna memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh mengenai perlindungan saksi dalam pencucian uang, langkah praktis yang dapat ditempuh adalah belajar dari negara-negara lain. Dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai perbandingan hal-hal pokok yang menjadi isi ketentuan pemberian perlindungan hukum bagi saksi dalam Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia yang menganut tiga (3) sistem hukum campuran (*civil law*, hukum adat, dan hukum Islam) dan di negara yang berbeda sistem hukum dengan Indonesia, yaitu Malaysia yang menganut sistem "*Common Law (Anglo Saxon)*" yang dalam penelitian ini mengambil perbandingan dengan Negara Malaysia.

Pada sub bab ini, akan dibahas satu persatu mengenai bagaimana perlindungan saksi baik biasa maupun pelapor yang diatur pada negara Indonesia dan Malaysia.

## **1. Indonesia**

Upaya pemerintah dalam pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Pencucian Uang dalam legalitas selanjutnya adalah dengan membuat peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pencucian Uang. Ketentuan itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sehubungan dengan adanya upaya pemerintah melawan *Money Laundering*, salah satunya dengan memberikan perlindungan kepada saksi kasus *Money Laundering* yang juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang ini. Dengan adanya suatu perlindungan orang tak akan ragu menjadi saksi dalam kasus *Money Laundering*, bahkan akan mau bekerja sama dalam pengungkapan tindak pidana *Money Laundering*.

Keterangan yang diberikan oleh saksi akan lebih bebas tanda adanya tekanan maupun ancaman dari tersangka/terdakwa maupun pihak terkait, maka tidak akan terjadi penarikan keterangan oleh seorang saksi yang tentunya akan menghambat pengungkapan delik pencucian uang, bahkan yang lebih parah lagi, seorang saksi akan merubah keterangan untuk meringankan pelaku pencucian uang. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menganut perlindungan khusus terhadap seseorang yang melaporkan suatu kejahatan kepada yang berwenang, yang sering disebut sebagai *whistle blower*. Demikian juga terhadap seseorang yang mengetahui suatu perbuatan kejahatan dan dijadikan sebagai saksi dalam kasus perbuatan pidana itu.

Peraturan perlindungan saksi dalam Undang-Undang *Money Laundering* akan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>36</sup>, dalam hal ini subyek yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang meliputi, saksi, korban, pelapor, dan keluarga saksi/korban adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (1): Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan tentang tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 44.



sendiri, ia alami sendiri, atau hal-hal yang ia ketahui berkenaan dengan suatu perkara pidana.

- b. Pasal 1 ayat (5): keluarga saksi adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau semenda dalam garis lurus dan kesamping sampai derajat ketiga, dan atau orang-orang yang menjadi tanggungan saksi, serta orang lain yang menurut Lembaga Perlindungan Saksi layak dilindungi.

Secara umum hak-hak seorang saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 5 yang diberikan berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hak-hak saksi tersebut meliputi:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Alternatif perlakuan bagi seorang saksi dan korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban meliputi:

- a. Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak sebagaimana dimaksud diatas, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial<sup>37</sup>.
- b. Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK, serta Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>38</sup>.
- c. Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan apabila dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK<sup>39</sup>.
- d. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikankesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Kesaksiannya diberikan secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membutuhkan tanda tangannya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2) dan (3).

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang<sup>40</sup>.

- e. Tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadap Saksi, Korban, dan pelapor baik secara pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali apabila memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan<sup>41</sup>.

Pengaturan pemberian perlindungan saksi dalam undang-undang pencucian uang diatur pada bab XI yaitu Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi yang tentang dalam Pasal 83 s.d Pasal 87. Cakupan subyek yang dilindungi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini tampaknya telah mengalami perluasan jika dibanding dengan ketentuan KUHAP. Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 mengatur mengenai perlindungan khusus pelapor. Pasal 86 dan Pasal 87 mengatur mengenai perlindungan hukum saksi. Ketentuan dalam Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> *ibid.*, Pasal 9.

<sup>41</sup> *ibid.*, Pasal 10.



#### Pasal 86

- (1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

- (1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perlindungan terhadap saksi sangat ditekankan di dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya adalah:

#### Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 39

Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 41

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 42 A

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan ppidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

Pada 11 November 2003, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 mengatur mengenai bentuk dan tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi sebagai pengaturan teknis pelaksanaan perlindungan saksi *Money Laundering*. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 yang dimaksud

dengan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya. Juga diberikan pengertian mengenai pelapor yang merupakan setiap orang yang:

- a. Karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; atau
- b. Secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Sedangkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, perlindungan diberikan kepada Pelapor dan Saksi baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas perlindungan yang diberikan kepada pelapor dan saksi tersebut tidak dikenakan biaya. Perlindungan yang diberikan diharapkan memberikan

jaminan atas rasa aman dan dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian pelapor dan saksi dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan yang diberikan adalah perlindungan khusus yang meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental, perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi, perahasaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi, dan/atau pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Sebenarnya pengaturan mengenai pelaksana pemberian perlindungan kepada saksi diatur dalam Undang-Undang Payung Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 yang telah dahulu dibuat, mengenai pengaturan pelaksana pemberian perlindungan kepada saksi telah diatur terlebih dahulu, yaitu dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikarenakan sampai saat ini LPSK belum maksimal dalam pemberian perlindungan kepada saksi tetap dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang *Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 2.

Di samping itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diatur pula perlindungan khusus terhadap saksi dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus kepada saksi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Setiap tingkat pemeriksaan berarti dalam penyidikan, penuntutan, dan selama proses persidangan.

Telah disebutkan di atas bahwa teknis pelaksanaan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003, diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian tersebut juga telah dilengkapi dengan pengaturan mengenai cara bertindak yang dilakukan bagi setiap anggota kepolisian dalam memberikan perlindungan baik kepada pelapor/saksi. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat Kepolisian NRI untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya. Perlindungan diberikan terhadap segala ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah pelapor



atau saksi, baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan tidak dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengelompokan bentuk perlindungan khusus tersebut meliputi 4 (empat) bentuk perlindungan.

**Pertama,** Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental. Perlindungan ini meliputi orang, tempat/lokasi (baik pada rumah/penginapan/tempat tinggal, tempat kerja/kantor/tempat persidangan, rute dan sarana transportasi, dan tempat-tempat kegiatan lainnya) dan/atau kegiatan (pada tahap sebelum, saat dan sesudah proses pemeriksaan) terhadap pribadi pelapor, saksi dan keluarganya<sup>43</sup>. Perlindungan diberikan terhadap kegiatan yang mungkin akan mendapat gangguan atau ancaman baik fisik (unjuk rasa, demonstrasi dan kerusuhan masa, penghadangan, perampokan, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan, gangguan kendaraan, tempat/rumah/kantor dan tempat kegiatan lainnya, dan/atau sabotase) maupun mental (teror dan intimidasi/ancaman terhadap keselamatan jiwa dan harta benda).

**Kedua,** perlindungan terhadap harta. Meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, terutama yang paling memungkinkan menjadi sasaran gangguan pihak pelaku. Sasaran perlindungan didasarkan atas permohonan pelapor/saksi serta penilaian dari pejabat Polri<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> *ibid.*, Pasal 7.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

**Ketiga,** Perlindungan atas perahasiaan dan penyamaran identitas. Dilaksanakan dengan merahasiakan dan menyamarkan nama, tempat/tanggal lahir (usia), jenis kelamin, alamat, pekerjaan, agama, status, pendidikan/gelar, kewarganegaraan dan suku bangsa<sup>45</sup>. Meliputi cara bertindak untuk membuat berita acara penyamaran identitas berdasarkan permohonan pelapor/saksi dan menyimpan berita acara penyamaran tersebut serta menyerahkan berita acara penyamaran setelah perkara dinyatakan lengkap kepada Jaksa Penuntut Umum.

**Keempat,** Perlindungan atas pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan<sup>46</sup>.

## 2. Malaysia

Rezim pelaksanaan Program Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AML/CFT) Malaysia di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 (AMLA) terus berubah seiring dengan trend global baru dan pengaturan yang diterima pakai di peringkat antara bangsa, yaitu Rekomendasi 40+9 FATF (Pasukan Petugas Tindakan Kewenangan mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram).

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman penjelasan Pasal 5 huruf c.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Pasal 5 huruf d.

*Law of Malaysia Act 613* yang dikenal dengan *Anti Money Laundering Act of 2001 (AMLA)* atau Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang di setujui oleh raja pada tanggal 25 Juni 2001, di umumkan dalam lembaran Negara pada tanggal 5 Juli 2001 dan mulai berlaku pada bulan Januari 2002. Malaysia bukanlah suatu pusat regional *Money Laundering*. Sektor keuangan informal dan formalnya sangat rentan dengan narkoba *traffickers*, pembiayaan terorisme, dan unsur kejahatan. Sejak 2000, Malaysia telah membuat kemajuan penting dalam membangun *Anti Money Laundering Act. Malaysia's National Coordination Committee to Counter Money laundering (NCC)*, yang anggotanya terdiri dari 13 badan pemerintahan, melihat dari draft *Malaysia's Anti-Money Laundering Act 2001 (AMLA)* dan mengkoordinir badan pemerintahan untuk *Anti-Money Laundering*.

*Anti Money Laundering Act of 2001 (AMLA)* tentang *Anti-Money Laundering*, yang diharapkan mampu memenuhi, mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan pemberantasan secara efektif setiap bentuk tindak pidana *Money Laundering* yang sangat merugikan keuangan negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Pemberantasan tindak *Money Laundering* salah satunya dengan mengatur mengenai ketentuan perlindungan saksi yang dikaitkan dengan efektif tidaknya pengaturan pemberian perlindungan saksi yang tertuang dalam *Anti Money*

*Laundering Act of 2001 (AMLA)* dalam upaya menanggulangi masalah *Money Laundering* di Indonesia.

Perlindungan saksi yang diatur dalam AMLA pada Part IV mengenai *Reporting Obligations* Pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *No civil, criminal, or disciplinary proceeding shall be brought against a person who:*
  - (a) *discloses or supplies any information in any report made under this Part; or*
  - (b) *supplies any information in connection with such a report, whether at the time the report is made or afterwards;*

*In respect of*

  - (aa) *the disclosure or supply, or the manner of the disclosure or supply, by that person, of the information referred to in paragraph (a) or (b); or*
  - (bb) *any consequences that follow from the disclosure or supply of that information, unless the information was disclosed or supplied in bad faith.*
- (2) *In proceedings against any person for an offence under this Part, it shall be a defence for that person to show that he took all reasonable steps and exercised all due diligence to avoid committing the offence.*

Adapun terjemahan bebasnya:

Bahwa perlindungan saksi pelapor adalah:

- (1) Tidak ada proses secara perdata, pidana atau ketertiban lainnya dapat dikenakan terhadap seseorang yang:
  - (a). mengungkapkan atau menyediakan segala informasi dalam segala laporan yang dibuat menurut undang-undang ini; atau
  - (b). menyediakan segala informasi yang berhubungan dengan suatu laporan, apakah pada saat laporan itu dibuat atau sesudahnya; dalam hal:
    - (aa) pengungkapan atau penyediaan, atau cara pengungkapan atau penyediaan, oleh orang tersebut, dari informasi sesuai dalam paragraf (a) atau (b); atau
    - (bb) segala akibat/dampak yang ditimbulkan/mengikuti pengungkapan atau penyediaan informasi tersebut, kecuali informasi yang diungkapkan atau disediakan dengan itikad tidak baik.

- (2) Dalam proses/tindakan yang dikenakan terhadap orang untuk suatu kejahatan menurut undang-undang ini, hal itu dapat menjadi suatu pembelaan bagi orang tersebut untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengambil langkah yang beralasan dan melaksanakan semua hak yang baik atau sesuai untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Pelaksanaan pemberian perlindungan saksi (saksi pelapor) khususnya dalam tindak pidana *Money Laundering* hanya didasarkan pengaturannya dalam Pasal 24 *Anti Money Laundering Act of 2001*. Pengaturannya dalam peraturan pelaksanaan juga belum dibuat, bahkan payung hukum perlindungan saksi juga masih dalam tahap Rang (Rancangan) Undang-Undang Perlindungan Saksi (Witness Protection Bill). Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi yang sedang digarap Parlemen Dewan Rakyat Malaysia baru-baru ini diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa saksi akan diberikan sepenuhnya perlindungan undang-undang, termasuk mengubah identitas saksi jika diperlukan. Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi yang hampir sampai pada tingkat akhir pembentukannya ini, ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada seorang saksi yang memberikan keterangan dalam keseluruhan proses penindakan kejahatan (kes jenaya) dan tidak lagi hanya diatur mengenai saksi pelapor saja. Oleh karena pemberi maklumat (saksi pelapor) lazimnya menjadi saksi maka mereka sudah tentulah akan dilindungi dibawah akta ini. Rang Undang-Undang ini juga akan menumbuhkan satu program bagi perlindungan saksi. Mengenai lembaga yang melaksanakan pemberian bantuan dan perlindungan saksi di Malaysia juga belum dibentuk.



Selain perlindungan saksi yang dimuat dalam Pasal 24 tersebut, perlindungan saksi mengenai kerahasiaan identitasnya telah diatur dalam Pasal 6 Anti Money Laundering Act of 2001 (AMLA) yang berbunyi:

- (2) *Subsection (1) shall not apply to a witness in any civil or criminal proceedings*
  - (a) *for an offence under subsection 4(1) or subsection (3) of this section; or*
  - (b) *where the court is of the opinion that justice cannot fully be done between the parties without revealing the disclosure or the identity of any person as the person making the disclosure*
- (3) *No person shall publish in writing or broadcast any information, including a report of any civil or criminal proceedings but excluding information published for statistical purposes by a competent authority or the Government, so as to reveal or suggest*
  - (a) *that a disclosure was made under section 5; or*
  - (b) *the identity of any person as the person making the disclosure*
- (4) *Subsection (3) shall not apply in respect of proceedings against the person making the disclosure for an offence under subsection 4(1) or subsection (1).*
- (5) *If information is published or broadcast in contravention of subsection (3), each of the following persons, namely*
  - (a) *in the case of publication as part of a newspaper or periodical publication, any proprietor, editor, publisher and distributor of the newspaper or periodical publication;*
  - (b) *in the case of a publication otherwise than as part of a newspaper or periodical publication, any person who publishes it and any person who distributes it;*
  - (c) *in the case of a broadcast, any person who broadcasts the information and, if the information is contained in a programme, any person who transmits or provides the programme and any person having functions in relation to the programme corresponding to those of the editor of a newspaper or periodical publication,*  
*commits an offence and shall on conviction be liable to a fine not exceeding fifty thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both, and, in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding one thousand ringgit for each day during which the offence continues after conviction.*
- (6) *In this section, "broadcast" includes any broadcast by radio, film, videotape, television or electronic media.*

Adapun terjemahan bebasnya adalah:

- (2) Ayat (1) tidak berlaku bagi seorang saksi dalam suatu perkara perdata atau proses pidana
  - (a) untuk pelanggaran berdasarkan pasal 4 ayat (1) atau ayat (3) bagian ini; atau
  - (b) dimana pengadilan berpendapat bahwa keadilan tidak dapat sepenuhnya ditegakkan antar pihak tanpa melakukan pengungkapan atau identitas setiap orang yang membuat penyingkapan.
- (3) Tidak seorang pun boleh mempublikasikan secara tertulis atau menyiarkan informasi apa pun, termasuk laporan proses perdata atau pidana, tetapi tidak termasuk informasi yang dipublikasikan untuk tujuan statistik oleh otoritas yang berwenang atau Pemerintah, untuk mengungkapkan atau menyarankan
  - (a) bahwa pengungkapan dibuat dalam bagian 5; atau
  - (b) identitas setiap atau sebagian orang yang membuat pengungkapan.
- (4) Ayat (3) tidak berlaku sehubungan dengan proses pengadilan terhadap orang yang mengungkapkan pelanggaran berdasarkan ayat 4 (1) atau ayat (1).
- (5) Apabila informasi yang diterbitkan atau disiarkan bertentangan dengan ayat (3), masing-masing orang sebagai berikut, yaitu:
  - (a) dalam hal penerbitan sebagai bagian dari surat kabar atau terbitan berkala, setiap pemilik, editor, penerbit dan distributor surat kabar atau terbitan berkala;
  - (b) dalam hal terbitan selain sebagai bagian dari surat kabar atau terbitan berkala, setiap orang yang menerbitkannya dan setiap orang yang mendistribusikannya;
  - (c) dalam hal siaran, setiap orang yang menyiarkan informasi dan, jika informasi tersebut terkandung dalam sebuah program, setiap orang yang mentransmisikan atau menyediakan program tersebut dan setiap orang yang memiliki fungsi dalam kaitannya dengan program yang sesuai dengan fungsi editor sebuah surat kabar atau terbitan berkala.

melakukan pelanggaran dan akan dikenakan hukuman denda tidak lebih dari lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau keduanya, dan dalam kasus pelanggaran yang berlanjut, denda lebih lanjut tidak melebihi seribu ringgit untuk setiap hari selama pelanggaran itu berlanjut setelah pemidanaan.

- (6) Dalam bagian ini yang dimaksud dengan “siaran” termasuk setiap siaran melalui radio, film, videotape, televisi atau media elektronik.

Malaysia menganut sistem hukum *common law*. Dapat dilihat bahwa kekuasaan hakim di dalam sistem hukum *common law* sangat luas dalam memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Bahkan hakim diperbolehkan tidak sepenuhnya bertumpu pada ketentuan suatu undang-undang jika diyakini olehnya bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus pidana yang sedang dihadapinya. Dalam hal demikian hakim dapat menjatuhkan putusannya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan. Dilihat dari segi kekuasaan hakim yang sangat luas dalam memberikan penafsiran tersebut, sehingga dapat membentuk hukum baru, maka nampaknya sistem hukum *common law* kurang memperhatikan kepastian hukum.

Dalam sistem *common law*, hakim diperbolehkan tidak sepenuhnya bertumpu pada ketentuan suatu Undang-Undang. Jika diyakini olehnya bahwa ketentuan yang dimaksud tidak dapat diterapkan dalam kasus yang sedang ditanganinya. Hakim cenderung bersifat *judge made law*, jadi dalam hal penerapan pengaturan perlindungan saksi dalam kasus-kasus yang ada, walaupun pengaturannya kurang dan sangat sempit karena hanya melindungi saksi pelapor, namun disini hakim dapat menentukan alternatif perlakuan bagi saksi yang bukan saksi pelapor. Efeknya dimungkinkan suatu pemeriksaan kasus *Money Laundering* tidak akan terhambat hanya karena belum ada aturan yang mengatur.

Aturan mengenai pemberian perlindungan saksi dalam Undang-Undang Pencucian Uang antara Negara Indonesia dan Malaysia adalah berbeda, baik dari bentuk perlindungannya maupun subyek yang dilindungi. *Law of Malaysia Act 613 Anti Money Laundering Act 2001 (AMLA)* negara Malaysia hanya memberikan suatu bentuk perlindungan bagi saksi pelapor (pemberi maklumat) yaitu bagi mereka yang mengungkapkan atau menyediakan informasi dalam suatu laporan tentang adanya tindak pidana pencucian uang (Pasal 24), sedangkan di Indonesia, sebagaimana dikandung Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditunjukkan dalam kepada saksi, pelapor, dan keluarga saksi maupun pelapor (Pasal 83 s.d Pasal 87).

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan perlindungan saksi tindak pidana *Money Laundering* di atas, maka dapat disederhanakan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Perbandingan Hukum Perlindungan Saksi di Indonesia dan Malaysia

Pembanding	Indonesia	Malaysia
Perlindungan Saksi	Tercantum dalam Bab IX perlindungan bagi pelapor dan saksi yang dimuat dalam Pasal 84, 85, 86, dan 87 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak	Tercantum dalam <i>Part IV (Reporting Obligations)</i> pada Pasal 24 mengenai <i>Protection of Persons reporting</i> .



Pembandingan	Indonesia	Malaysia
	Pidana Pencucian Uang.	
Subjek perlindungan	Perlindungan yang ditujukan kepada saksi, pelapor, dan keluarga saksi/pelapor.	Perlindungan yang diberikan hanya ditujukan kepada saksi pelapor saja (pemberi maklumat).
Bentuk perlindungan	<p>a. Perlindungan atas saksi pelapor atau saksi biasa untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;</p> <p>b. Perlindungan keamanan atas dirinya, keluarganya, dan hartanya;</p> <p>c. Perlindungan atas identitas pribadinya; dan</p> <p>d. Perlindungan atas pemberian tanpa perlu menghadiri persidangan secara langsung (melalui telekonferensi);</p> <p>e. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK disebutkan bahwa saksi berhak mendapatkan perlindungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya;</li> <li>2. Turut serta dalam memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;</li> <li>3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;</li> <li>4. Bebas dari pertanyaan menjerat;</li> <li>5. Mendapat penerjemah;</li> <li>6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;</li> <li>7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;</li> <li>8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;</li> </ol>	<p>Tidak proses secara perdata, pidana atau ketertiban lainnya dapat dikenakan terhadap seseorang yang telah mengungkapkan atau menyediakan informasi. Perlindungan tersebut tidak berlaku apabila saksi mengungkap atau menyediakan informasi dengan itikad tidak baik.</p>



Pembandingan	Indonesia	Malaysia
	9. Dirahasiakan identitasnya; 10. Mendapat tempat keadilan sementara; 11. Mendapat tempat kediaman baru; 12. Memperoleh penggantian biaya transportasi; 13. Mendapat nasihat hukum; 14. Memperoleh biaya hidup sementara; 15. Mendapat pendampingan.	
Pelaksana Perlindungan Saksi	Pelaksanaan ketentuan perlindungan saksi berdasar ketentuan dalam UU pencucian uang, yang secara teknis dilakukan menurut aturan pelaksanaan yaitu pada PP No. 57 Tahun 2003, Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 17 Tahun 2005 dan 87 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Hanya berdasar <i>Law of Malaysia Act 613 Antimoney Laundering Act 2001</i> .
Kelebihan dan Kekurangan	<b>Kelebihan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Perundang-Undangan di Indonesia melindungi bukan hanya saksi pelapor namun juga saksi biasa;</li> <li>2. Seseorang dilarang melakukan kekerasan terhadap saksi;</li> <li>3. Seseorang dilarang menyebabkan saksi kehilangan pekerjaan karena telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan;</li> <li>4. Seseorang dilarang memberitahukan keberadaan saksi yang sedang dilindungi;</li> <li>5. Selain seseorang yang melakukan hal di atas, UU juga mengatur tentang korporasi yang melakukan tindakan tersebut di atas.</li> </ol>	<b>Kelebihan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Law of Malaysia Act 613 Antimoney Laundering Act 2001</i> telah mengatur tentang perlindungan identitas saksi pelapor di media massa.</li> </ol>

Pembandingan	Indonesia	Malaysia
	<b>Kekurangan</b> 1. Indonesia belum membuat aturan yang mengerucut mengenai publikasi identitas saksi.	<b>Kekurangan</b> 1. Sedangkan <i>Law of Malaysia Act 613 Antimoney Laundering Act 2001</i> hanya mengatur perlindungan terhadap saksi pelapor.

### 3. Implementasi Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, konteks pembuktian pidana merupakan inti dari persidangan perkara pidana dalam sistem peradilan umum di Indonesia, untuk mencari kebenaran materiil. Sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip *negatif wettelijk bewijs theorie* (sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif), pernyataan tersebut diperkuat sebagaimana bunyi Pasal 183 KUHP:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan “*Standar Beyond a reasonable doubt*” (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan), dan

pidana yang dijatuhkan adalah dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan<sup>47</sup>.

Alat bukti yang sah dalam persidangan telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana dijelaskan di atas adalah keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu<sup>48</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa implementasi perlindungan saksi tindak pidana *Money Laundering*:

- a. Tidak menghadirkan saksi di ruang persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat pembuktian tindak pidana *Money Laundering* dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi. Dengan begitu identitas saksi tidak dapat diketahui oleh tersangka maupun orang yang di dalam persidangan. Meskipun saksi tidak dihadirkan dalam persidangan, tetapi saksi tetap disumpah sebelum dimintai keterangan oleh majelis hakim<sup>49</sup>.
- b. Saksi diberikan keleluasaan dalam hal memberikan keterangan, hal tersebut dilakukan demi psikis saksi. Sebagaimana stigma yang beredar di masyarakat bahwa menjadi saksi merupakan suatu hal yang menakutkan. Apalagi menjadi saksi tidak pidana *Money*

<sup>47</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang: UNPAM Press, hlm. 36.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 ayat (27).

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bp. Alfis Setiawan S.H, M.H, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis 8 April 2021 pukul 10:15 WIB.

*Laundering* dari korupsi, dimana yang kita ketahui bahwa tindak pidana *Money Laundering* hasil korupsi melibatkan banyak instansi salah satunya instansi besar yaitu KPK. Keleluasaan saksi dalam memberikan keterangan ini telah diatur dalam bunyi Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang berbunyi bahwa saksi memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun<sup>50</sup>.

- c. Saksi juga mendapatkan kerahasiaan identitasnya, pada implementasinya di persidangan tindak pidana *Money Laundering* dilakukan terhadap saksi pelapor dan saksi biasa. Hal ini dilakukan demi melindungi jiwa dari saksi dari risiko menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh pihak tersangka<sup>51</sup>.
- d. Turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan atas dirinya, keluarga, dan harta bendanya dari ancaman atas kesaksiannya. Namun dalam perlindungan tersebut, terjadi kendala yaitu mengenai lembaga yang bernaung yaitu LPSK belum dapat memberikan jangkauan yang lebih atas apa yang dikehendaki saksi<sup>52</sup>.

## **B. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perlindungan Saksi di Indonesia Sebagai *Ius Constituendum***

Pada pembahasan dalam sub-bab sebelumnya di atas telah dijelaskan mengenai pengaturan perlindungan saksi dan korban di Indonesia saat ini, sebagaimana diketahui bahwa wujud perlindungan baik secara langsung atau konkret maupun secara tidak langsung atau abstrak kepada saksi tindak pidana *Money Laundering*.

Melihat begitu luasnya bentuk perlindungan yang diberikan baik kepada saksi di Indonesia, penulis hanya akan melakukan kajian perbandingan terhadap Undang-Undang yang dirasakan mampu memberikan aspirasi dan masukan terhadap perlindungan saksi yang akan dituangkan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bp. Alfis Setiawan S.H, M.H, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis 8 April 2021 pukul 10:15 WIB.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bp. Alfis Setiawan S.H, M.H, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis 8 April 2021 pukul 10:15 WIB.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bp. Alfis Setiawan S.H, M.H, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis 8 April 2021 pukul 10:15 WIB.



dalam satu wadah produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini diharapkan mampu memberikan segala bentuk perlindungan kepada saksi secara luas (baik secara langsung atau konkret maupun secara tidak langsung atau abstrak) tanpa adanya batasan kepada saksi dalam tindak pidana pencucian uang untuk mendapatkan perlindungan dalam proses peradilan.

#### **1. Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang**

Perlindungan saksi dan korban pada masa yang akan datang pada dasarnya telah diterapkan dalam Konsep KUHP Tahun 2019 yang hingga kini tidak kunjung disahkan, terdapat beberapa ketentuan yang mengacu kepada perlindungan yang berorientasi kepada korban secara langsung dalam ketentuan Buku Kedua Bab VI Tindak Pidana terhadap Proses Keadilan bagian kedua tentang perlindungan korban dan saksi, adapun ketentuan tersebut yaitu:

##### **Pasal 298**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang yang melakukan Kekerasan langsung kepada:

- a. saksi saat memberikan keterangannya; atau
- b. aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangannya.



Pasal 299

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Setiap Orang yang:
  - a. menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap saksi dan/atau Korban sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan; atau
  - b. mempengaruhi Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan Luka Berat pada saksi dan/atau Korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya saksi dan/atau Korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 300

Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 301

Setiap Orang yang menyebabkan saksi, Korban, atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 302

Setiap Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi atau Korban padahal saksi atau Korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 303

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Pada Pasal 299, diatur mengenai orang yang secara langsung melakukan penyerangan terhadap saksi pada saat memberikan kesaksiannya di pengadilan yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum (hakim, jaksa, panitera, atau petugas kepolisian) yang sedang menjalankan tugasnya pada saat proses peradilan tersebut sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Perlindungan terhadap saksi dalam Pasal ini merupakan perlindungan secara tidak langsung yang diberikan kepada saksi.

Pada beberapa Pasal dalam RUU KUHP tahun 2019 di atas, tidak termuat perlindungan saksi secara langsung. Perlindungan saksi secara langsung dapat diberikan melalui pidana tambahan sebagaimana bunyi Pasal 66 ayat (1):

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

## **2. Sumbangsih Pemikiran Perlindungan Saksi Tindak Pidana *Money Laundering* dalam Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang**

Merujuk pada perlindungan identitas saksi yang dimuat dalam Pasal 6 *Anti Money Laundering Act of 2001 (AMLA)*, yang pada intinya bahwa identitas saksi pelapor tidak boleh diungkap oleh siapapun dalam media apapun termasuk media publikasi dan/atau siaran dalam surat

kar, radio, film, *videotape*, televisi atau media elektronik. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan dikenakan denda kurang dari 50 ribu Ringgit dan/atau penjara kurang dari 1 (satu) tahun. Sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya, dalam Pasal 85 kerahasiaan identitas pelapor dilaksanakan dalam sidang pengadilan saja. Sehingga sangatlah lebih baik apabila perlindungan identitas saksi pelapor juga dilaksanakan di luar pengadilan, termasuk dari media-media itu sendiri.

Kemudian, mengenai pendapat narasumber mengenai perlindungan saksi pelapor yang dimuat dalam Pasal 6 *Anti Money Laundering Act of 2001 (AMLA)*:

“Bahwasannya, perlindungan identitas saksi baik pelapor maupun saksi biasa pada sistem perundang-undangan di Indonesia masih mengatur secara umum, sedangkan dalam Pasal 6 AMLA telah mengatur secara sempit dimana selain di dalam persidangan identitas pelapor juga tidak boleh dipublikasikan dalam media apapun, sehingga hal tersebut dapat menjadi rujukan badan legislatif dalam merumuskan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban di masa mendatang”<sup>53</sup>.

Perlindungan terhadap identitas saksi dan korban merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi, perlindungan ini telah diatur dalam Pasal 336 Konsep KUHP, namun hanya untuk tindak pidana tertentu (terorisme, korupsi, hak asasi manusia atau pencucian uang) dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori II, perlindungan terhadap saksi dan korban harusnya tidak dibatasi dalam tindak pidana tertentu saja seperti yang telah disebutkan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bp. Alfis Setiawan S.H, M.H, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis 8 April 2021 pukul 11:10 WIB.

diatas, tetapi harus lebih luas agar perlindungan identitas saksi dan korban yang melaporkan suatu tindak pidana dapat mendapatkan perlindungan sepenuhnya.

Perlindungan yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan terhadap harta benda saksi dan korban yang tidak mendapat pengaturan dalam Konsep KUHP, dalam Konsep KUHP perlindungan terhadap harta benda hanya dilindungi pada masa perang atau konflik bersenjata, seperti yang tertera pada Pasal 396 Konsep KUHP, pengaturan perlindungan terhadap harta benda saksi dan korban dirasa penting karena dapat mempengaruhi saksi dan korban dalam memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan. Pengaturan mengenai perlindungan harta benda saksi dan korban dapat diikuti dengan ganti kerugian yang dapat diberikan kepada saksi dan korban apabila harta benda saksi dan korban tersebut hilang atau musnah akibat dari tindakan yang bertujuan untuk membuat saksi dan korban tidak memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan.

Selain hal-hal tersebut diatas, dalam pengaturan perlindungan saksi yang belum diatur pemerintah adalah mengenai ketentuan pelaksana perlindungan saksi. Adanya perbedaan dalam ketentuan payung hukum perlindungan saksi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan pengaturan khusus yang telah ada sebelumnya, dalam hal pelaksana perlindungan saksi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pelaksanaan



perlindungan saksi dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun pada ketentuan pelaksanaan pengaturan pencucian uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003, pelaksana perlindungan khusus terhadap saksi dilakukan oleh pihak kepolisian.

Kehadiran LPSK ini, kemungkinan nantinya malah terhadang persoalan teknis. Yang perlu diatur lagi adalah mengenai apakah kedudukan LPSK nanti akan benar-benar independen (dibawah satu lembaga yang dibentuk khusus untuk perlindungan saksi) seperti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, atau nantinya akan berada di bawah Kepolisian Negara RI. Selain itu belum adanya Perundang-undangan terhadap tugas LPSK dalam memberikan perlindungan secara terperinci terhadap saksi tindak pidana *Money Laundering*.

Ada segi positif yang dapat diambil jika nantinya LPSK berada di bawah kepolisian, yaitu dengan pengalaman, struktur dan infrastrukturnya, Kepolisian jelas lebih siap jika ada yang berniat buruk kepada saksi. Selain itu struktur Kepolisian cukup lengkap dan luas untuk menjangkau wilayah negara. Hal ini berbeda jika dibentuk sebuah lembaga baru yang strukturnya belum jelas. Apalagi pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah mengatur tentang kewenangan Kepolisian dalam hal perlindungan saksi.